

Vol. 10 No. 1 Oktober 2023

p-ISSN : 2252-4150

e-ISSN : 2716-3474

## **Civic Education Wawasan Kebangsaan di Kalangan Gen Z di Kota Palembang**

**Al Fathi<sup>1</sup>, Amaliatulwalidain<sup>2</sup>, M. Qur'anul Kariem<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Ilmu Pemerintahan dan Budaya, Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri

E-mail: [2019610032@students.uigm.ac.id](mailto:2019610032@students.uigm.ac.id)

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang dalam melaksanakan pendidikan kewarganegaraan yang berwawasan kebangsaan pada generasi Z di masa depan. kota palembang pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu menggunakan metode penelitian dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. didasarkan pada teori *Civic Education* yang terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu: Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Knowledge*), Kompetensi Sikap Kewarganegaraan (*Civic Dispositions*), Kompetensi Sikap Kewarganegaraan (*Civic Skills*). Dapat disimpulkan bahwa peran Badan Kesbangpol Kota Palembang dalam pendidikan kewarganegaraan khususnya pada generasi Z di Kota Palembang cukup baik dengan target jumlah SMP sebanyak 60 SMP dan program program yang di rencanakan terlaksana dengan baik, terdapat 2 faktor penghambat dalam penyelenggaraan pendidikan lanjutan, seperti pendidikan keterampilan dan pendidikan sikap secara khusus. Faktor penghambat pertama adalah kurangnya sumber daya manusia dan faktor penghambat kedua adalah kurangnya dana untuk melaksanakan program lanjutan secara khusus.

**Kata Kunci:** Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan, Peran Kesbangpol, Kota Palembang

### **ABSTRACT**

*This research was conducted to find out how the National Unity and Politics Agency of Palembang City is implementing citizenship education with a national perspective for generation Z in the future. Palembang city in 2022. This research uses a qualitative approach, namely using research methods with data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. based on Civic Education theory which consists of 3 (three) indicators, namely: Civic Education Competency (Civic Knowledge), Civic Attitude Competency (Civic Dispositions), Civic Attitude Competency (Civic Skills). It can be concluded that the role of the Palembang City Kesbangpol Agency in citizenship education, especially for generation Z in Palembang City, is quite good with a target of 60 junior high schools and the planned programs are being implemented well. There are 2 inhibiting factors in the implementation of further education, such as skills education and special attitude education. The first inhibiting factor is the lack of human resources and the second inhibiting factor is the lack of funds to implement specific follow-up programs*

## 1. PENDAHULUAN

Penguatan pemikiran bangsa, yakni dengan pembinaan pemikiran kebangsaan yaitu nilai-nilai yang berasal dari ideologi Pancasila, patut jadi pemahaman untuk seluruh masyarakat di Indonesia. selanjutnya, diharapkan dengan adanya pemahaman pada pemikiran kebangsaan serta pengengelolaan tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan membentuk kota Palembang untuk kedepannya bisa mengantisipasi adanya pengaruh buruk[1].

Wawasan kebangsaan ialah kewajiban bagi setiap warga negara, alhasil terbentuklah sikap moral yang kokoh, untuk berpartisipasi dalam tujuan memperkokoh persatuan serta kesatuan NKRI. Penguatan pemikiran bangsa harus diberikan terhadap generasi z saat ini yang terkumpul dalam formasi formasi kepemudaan ataupun yang terkumpul melalui sosialisasi atau pendidikan pada generasi muda.

Dampak dari munculnya globalisasi bisa dilihat pada perubahan peran sebuah negara serta bangsa, yang dimana dunia barat mendominasi perubahan suatu bangsa dengan peradaban individualistik yang dimilikinya. Keberhasilan dari peradaban individualistik ini kemudian mendorong negara-negara barat untuk mengimplementasikan semua konsepnya dengan bakat yang dimilikinya kepada negara berkembang. Ruang global ini menawarkan berbagai kesempatan untuk mengembangkan ideologi kapitalis liberal untuk menguasai dunia dengan kekuatan

dari segi ekonomi yang dimilikinya. Sebagai sebuah negara yang memiliki berbagai ras, Bahasa, suku, adat istiadat, budaya serta hukum yang beragam, hal ini dapat menimbulkan keraguan bagi bangsa Indonesia dengan ideologi Pancasila yang dilandaskan pada saat ini apakah akan tetap ada dan bertahan ditengah dominasi ideologi liberalisme yang mengarah pada radikalisme. Radikalisme sendiri adalah sebuah Gerakan sosial atau politik dengan melibatkan masyarakat yang mengacu pada suatu proses, praktek atau rangkaian kepercayaan dari non radikal ke radikal. Gerakan radikal itu sendiri banyak memperkenalkan pemikiran dan memperbanyak jangkauan sasarannya melalui Gerakan generasi muda seperti mahasiswa dan pelajar yang masih mencari jati diri dalam berbagai hal, dimulai dari tahap pembelajaran yang menjadi sarana paling efektif untuk memperkuat adanya paham radikalisme.[2].

Era globalisasi saat ini sangat mustahil dan tidak mungkin dapat dihindari oleh semua elemen masyarakat. Era globalisasi itu sendiri menuntut akan adanya kemajuan dan kualitas yang justru cenderung meningkatkan nilai dan martabat manusia serta pemikiran manusia yang lebih berkembang, Oleh karena itu, globalisasi jika disikapi dengan sebijaksana mungkin akan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat Indonesia, sebaliknya akan menimbulkan perubahan cara hidup dan

penurunan pemahaman serta wawasan kebangsaan rakyat[3].

Kekhawatiran akan lunturnya paham kebangsaan semakin memprihatinkan dalam aktivitas kehidupan dan perilaku masyarakat. Adanya perasaan sentimen yang mengarah kepada kelompok tertentu yang pada akhir ini sangat peka terhadap gesekan dan konflik antar masyarakat yang sangat rawan tergerus oleh pemahaman-pemahaman yang bisa membuat kekeliruan[4].

Sosialisasi yang diberikan kepada generasi z saat ini adalah sebuah sosialisasi yang berwawasan kebangsaan, yang meliputi pelajaran multikulturalisme, UUD 1945, penguatan ideologi dan nilai-nilai dari pancasila,sikap toleransi, paham akan bahaya dari radikalisme, dan disintegrasi di Indonesia. Karena ini merupakan Pendidikan dari sebuah nilai yang harus ditanamkan kepada generasi z di kota palembang, agar memiliki pemikiran yang luas dan sikap multikultural serta biasa hidup dengan berdampingan dalam karakter, budaya, agama serta Bahasa yang berbeda, serta menghargai hak setiap warga nkri, tanpa memandang suku mayoritas atau juga pada minoritas, serta dapat membangun bangsa secara bergotong royong, menumbuhkan jiwa dan rasa hormat terhadap sesama, agar kesalah pahaman tidak menimbulkan perpecahan, dapat menghindari dan menghadapi dampak lingkungan yang negatif[5].

Berlandaskan pemikiran dan upaya pemerintah untuk menjaga keutuhan serta menumbuhkan pemahaman pada wawasan kebangsaan bagi generasi z

yang menjadi tantangan utama bagi masa depan bangsa Indonesia, Badan Kesbangpol menciptakan pendidikan yang menitikberatkan pada keinginan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan bagi generasi z Kota Palembang. Pra penelitian yang telah dibuat dengan total 52 responden generasi z di Kota Palembang menunjukkan bahwa yang pernah mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan mencapai 32,7% dari total keseluruhan dan yang tidak pernah mengikuti sebesar 67,3%, hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya akses sosialisasi wawasan kebangsaan kepada gen z saat ini.

Melihat dari latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini ialah untuk melihat Upaya yang di lakukan badan kesbangpol dalam Civic Education wawasan kebangsaan di kalangan gen z di kota Palembang serta faktor penghambat bagi badan kesbangpol kota Palembang dalam proses pelaksanaan Pendidikan wawasan kebangsaan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Sebutan kebijakan atau *policy* asal dari bahasa Yunani “*polis*” yang artinya negara, kota yg lalu masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “*politia*” yang pengertiannya adalah negara. Dan saat di artikan ke dalam bahasa Inggris “*policie*” berkenaan menggunakan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan buat menunjuk perilaku seorang tokoh (contohnya seseorang pejabat, suatu grup maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah tokoh pada suatu bidang kegiatan

eksklusif. kebijaksanaan artinya anak asal integritas yaitu integritas terhadap prinsip, dan ibunya artinya kerendahan hati serta ayahnya ialah keberanian. kemudian kebijakan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik. Sedangkan kata publik (*public*) sendiri sebagian mengartikan negara[6].

Strategi serta arah kebijakan waktu menengah diperlukannya klasifikasi seperti usaha dalam bentuk program serta kegiatan yg akan diterapkan tiap tahunnya. Perancangan program mengacu kepada program Rencana Pemerintah Daerah (RPD) Kota Palembang Tahun 2024-2026. Renstra Badan Kesbangpol Kota Palembang dalam menjalankan Program wawasan kebangsaan yang di laksanakan ini merupakan sebuah. Pengertian secara luas kebijakan Perangkat wilayah pada bentuk upaya yg berisi satu atau banyak kegiatan menggunakan sumberdaya yg ada, buat mencapai yang akan terjadi yang terukur sesuai menggunakan tugas serta fungsi Setiap acara memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yg sama juga tidak sama. Meskipun begitu, tujuan akhir asal aplikasi acara akan mengarah di penguatan peran Badan Kesbangpol Kota Palembang. Sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran renstra, program perangkat daerah mengacu pada strategi dan arah kebijakan sebagai mana dijelaskan sebelumnya. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh Badan Kesbangpol

Kota Palembang dalam 3 (tiga) tahun mendatang[7].

Ruang lingkup Pendidikan Nasional, *Civic Education* atau Pendidikan kewarganegaraan menjadi wadah buat mewujudkan "Berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman serta bertakwa pada tuhan yang maha esa, berakhhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi masyarakat negara yg demokratis dan bertanggung jawab".

Kompetensi dasar atau yang sering di sebut kopetensi minimal yang akan di transformasikan dan distransmisikan terdiri dari tiga jenis yakni:

1. Kompetensi pengetahuan kewarganegaraan (*Civic knowledge*)
2. Kompetensi sikap kewarganegaraan (*Civic Skills*)
3. Kompetensi sikap kewarganegaraan (*Civic dispositions*) [8]

Selanjutnya Generasi Z atau juga disebut Gen Z merupakan sebuah generasi yang lahir pada kurun waktu 1995 hingga pada 2010 sesudah generasi milenial. Gen Z mempunyai banyak kesamaan dengan generasi Y, tetapi mereka memiliki pola pikir yang lebih maju dan modern terhadap internet dan juga dunia maya. pemerintah juga telah berperan dalam menyiapkan Generasi Z yang memiliki karakter dan pemahaman baik dalam menghadapi era ini. Institusi pendidikan atau sekolah saat ini sarat dengan Generasi Z dan kesadaran pimpinan sekolah (kepala sekolah, guru dan staf) untuk menghadapi Generasi Z sangatlah penting. Oleh karena itu, instansi Pendidikan harus memasukan nilai yang mengandung karakter yang

baik terhadap pemahaman generasi ini terhadap teknologi sebagai sebuah sarana pembelajaran, agar siswa dapat melakukan kegiatan produktif dengan teknologi serta tetap menjaga nilai-nilai tersebut pada generasi terdidik[9].

Maka tujuan dari pemaparan penelitian ini adalah untuk mencari perbedaan dari beberapa penelitian sebelumnya yang akan menjadi acuan pada penulisan yang di teliti oleh penulis karena memiliki persamaan penelitian yaitu meneliti tentang sosialisasi dan Pendidikan wawasan kebangsaan pada generasi z atau generasi muda oleh badan kesatuan bangsa dan politik.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian yang diangkat oleh peneliti yang berjudul *Civic Education* wawasan kebangsaan di kalangan Gen Z di Kota Palembang tahun 2022, menggunakan metode pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah sebuah penelitian yang bisa dipergunakan untuk mengamati atau meneliti tatanan hidup atau kegiatan pada masyarakat, sejarah kehidupan atau lingkupnya, pola perilaku masyarakat, fungsi dari organisasi, Gerakan sosial, atau hubungan kemasyarakatan pada periode waktu saat ini dengan berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sesuai dengan realita dan juga keadaan yang benar terjadi[10].

Unit analisis yang dipilih penulis dalam menjalankan penelitian ini adalah Kantor Badan Kesbangpol Kota Palembang yang berada di Jl. Lunjuk Jaya No.3, Demang lebar daun Kec. Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatra Selatan 30137.

Data yang di kumpulkan pada

penelitian ini terbagi menjadi dua jenis penelitian yakni: Penelitian Primer dan Penelitian Sekunder. Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh secara langsung dari observasi lapangan yang di peroleh dari wawancara langsung dengan pihak Badan Kesbangpol Kota Palembang dan pihak lain yang terlibat dalam penelitian ini, dokumentasi juga dilakukan dalam penelitian ini pada saat wawancara untuk mendapatkan bukti penelitian. Sedangkan Penelitian sekunder di dapatkan dari data pendukung seperti dokumen, jurnal atau karya ilmiah, buku, artikel relevan, dll berupa sebuah data penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini digunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merubah penjabaran terkait topik penelitian yang dibahas. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang didapat dari berbagai sumber seperti dokumen resmi, gambar, pemberitaan dan melakukan observasi serta wawancara langsung bersama informan-informan yang terkait.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kemampuan dan kecakapan terkait materi inti pendidikan kewarganegaraan (*Civic Knowledge*) tujuan di laksanakannya pendidikan wawasan kebangsaan kepada generasi z ialah untuk mengajarkan, menanamkan dan membekali para peserta didik dengan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang hak, kewajiban, serta tanggung jawab sebagai warga negara, pihak kesbangpol Kota Palembang telah melaksanakan Pendidikan wawasan kebangsaan kepada 60 sekolah dengan

mengundang perwakilan 5 orang dari setiap sekolah dan 2 orang guru dari setiap sekolah yang di selenggarakan di tempat yang telah kesbangpol kota Palembang sediakan, dalam melaksanakan program sosialisasi pihak badan kesbangpol kota Palembang berkolaborasi dengan berbagai instansi seperti TNI, POLRI, Akademisi Universitas Sriwijaya dan Kesbangpol Provinsi Sumatra Selatan. Peran TNI, POLRI Akademisi dari pihak universitas sriwijaya dan kesbangpol provinsi yakni memberikan materi tentang wawasan kebangsaan yang membedakan dari kedua instansi tersebut yaitu materi yang di berikan di irangi dengan diskusi seperti diskusi tentang larangan melakukan tauran, jika ada keributan ataupun perlakuan negatif di lingkungan Masyarakat harus di hindari dan di gantikan dengan kegiatan positif seperti melakukan kegiatan belajar, perbedaan Pendidikan sosialisasi yang di laksanakan pihak kesbangpol dan pendidikan PPKN yang ada di sekolah tidak ada bedanya pendidikan yang kesbangpol kota Palembang lakukan sama sama bertujuan agar memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang wawasan kebangsaan, yang membedakan yakni mata pelajaran ppkn tersebut masuk pada kurikulum pendidikan di sekolah sedangkan pendidikan sosialisasi yang kesbangpol kota Palembang laksanakan berpacu pada perwali kota Palembang.

Sosialisasi yang di laksanakan Badan Kesbangpol Kota Palembang hanya memiliki alat ukur yang menyatakan berhasil atau tidaknya program kerja yang di laksanakan, apabila program kerja yang di laksanakan

berjalan dengan lancar maka program tersebut dinyatakan berhasil. Namun, untuk siswa/siswi didik belum memiliki alat ukur untuk menilai berhasil atau tidak nya program yang dilaksanakan oleh pihak Badan Kesbangpol Kota Palembang.

Keterampilan kewarganegaraan (*Civic Skills*) Program yang dilaksanakan Pihak Badan Kesbangpol Kota Palembang pada saat ini berupa memberikan pendidikan kewarganegaraan untuk Siswa/Siswi Sekolah menengah di Kota Palembang. Keterampilan kewarganegaraan Menurut pemahaman peserta didik ialah kemampuan untuk tidak cepat terprovokasi oleh berita hoax, mampu dan memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan kegiatan Masyarakat, akan tetapi Program lanjutan seperti penanaman skills atau keterampilan belum dapat di laksanakan pihak kesbangpol Kota Palembang akan dikarenakan terkendala oleh dana.

Kompetensi Sikap kewarganegaraan (*Civic Dispositions*) penerapan nilai-nilai dari 5 butir pancasila yang dilaksanakan oleh Siswa/Siswi Sekolah Menengah yaitu dengan cara: menghargai kepercayaan di lingkungan pertemanan mereka, menghormati orang yang lebih tua yang berada di lingkungan sekolah, aktif dan andil dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekolah, tidak menyukai dan menghindari adanya kekerasan ataupun keributan di lingkungan tersebut serta menerapkan sikap adil dan lebih memilih bijaksana dalam bermusyawarah Ketika menyelesaikan sebuah permasalahan.

Kegiatan yang di laksanakan kesbangpol Kota Palembang untuk menanamkan wawasan kebangsaan bagi pelajar berupa sebuah kegiatan dengan cara sosialisasi di karenakan faktor kurangnya sumber daya manusia dan juga belum adanya dana untuk melaksanakan Pendidikan khusus untuk menanamkan *skills* pada peserta didik. Kegiatan kesbangpol kota Palembang di tahun sebelumnya Jika ada dana lebih pihak kesbangpol kota Palembang melaksanakan *outbond* sebagai cara lain dalam memberikan Pendidikan wawasan kebangsaan dengan cara bermain dengan peserta didik dengan memasukan unsur unsur pemahaman wawasan kebangsaan akan tetapi tahun ini pihak kesbangpol kota Palembang hanya melaksanakan sosialisasi.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

Pihak kesbangpol kota Palembang telah melakukan upaya pendidikan sosialisasi dengan baik, terlihat dari program yang di rencanakan melakukan sosialisasi dengan 60 sekolah SMP dapat terjalan dengan baik, dengan berkolaborasi dengan pihak pihak terkait seperti TNI, POLRI, Perwakilan Akademisi Unsri dan Kesbangpol provinsi dengan cara memberikan pendidikan sosialisasi secara materi dan juga berdiskusi, Materi yang di tuangkan saat diskusi yang paling mencolok adalah materi tentang pencegahan keributan antar pelajar. Jika pihak kesbangpol kota Palembang mempunyai dana lebih selain pendidikan dengan cara sosialisasi pihak kesbangpol kota Palembang juga melakukan pendidikan wawasan

kebangsaan dengan cara belajar sambil bermain (*outbond*). Pihak kesbangpol kota Palembang belum mempunyai alat ukur dari pemahaman peserta didik tentang wawasan kebangsaan, tolak ukur keberhasilan program sosialisasi hanya di ukur dari program tersebut terjalan dengan lancar atau tidak. Faktor yang menjadi penghambat dalam pendidikan lanjutan seperti penanaman sikap dan keterampilan kewarganegaraan secara khusus ada 2 menurut staf bidang ideologi dan wawasan kebangsaan menyatakan kurangnya sumber daya manusia sedangkan menurut Kepala subbidang ideologi dan wawasan kebangsaan kesbangpol kota Palembang faktor penghambat dalam pendidikan keterampilan dan sikap kewarganegaraan adalah “dana” jika dananya cukup dapat mengatasi berbagai macam hambatan jika kekurangan sumber daya bisa meminta bantuan dari pihak luar yang terkait asalkan dananya ada.

### SARAN

Hasil dari penelitian dan kesimpulan yang sudah di paparkan di atas, maka terdapat beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat untuk pihak pihak yang berkepentingan yaitu:

#### 1. Segi Pemahaman Peserta Didik

Pihak kesbangpol kota Palembang kiranya dapat mengukur pengetahuan siswa/siswi didik tidak hanya mengukur keberhasilan lewat program di jalankan terjalan semua tetapi juga mengukur pengetahuan dan pemahaman siswa siswi setelah di lakukan sosialisasi seperti membagikan angket pertanyaan kepada siswa/ siswi sebagai tolak ukur

pengetahuan yang di sampaikan benar benar di mengerti, agar program sosialisasi yang telah berhasil di laksanakan dapat melahirkan kader kader yang berkompeten.

## 2. Segi Kegiatan Tahunan

Pihak kesbangpol dapat melaksanakan acara pemilihan duta wawasan kebangsaan kepada siswa/siswi dengan sifat terbuka dan di saksikan oleh khalayak umum. Dengan tujuan agar menjadi contoh teladan bagi siswa/siswi lain di setiap sekolah dan juga dapat memotivasi Siswa/Siswi yang lain agar lebih tertarik, mempunyai rasa ingin tahu yang besar tentang apa itu pendidikan kewarganegaraan, bagaimana sikap kewarganegaraan yang baik, dan apa itu keahlian kewarganegaraan yang dapat di laksanakan dalam kehidupan bermasyarakat.

## 3. Segi Program Kerja Tambahan

Pihak kesbangpol kota Palembang khusus nya di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan kiranya dapat merancang program kerja penanaman keterampilan dan sikap kewarganegaraan dengan cara khusus kepada siswa/siswi yang benar-benar di latih untuk pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan serta, penerapan di kehidupan sehari hari dan juga agar dapat berpartisipasi dalam demokrasi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Lestari, "penguatan nilai-nilai kedisiplinan pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi era industri 4.0," *Jurnal pendidikan kewarganegaraan dan hukum*, 2020.
- [2] Sahal Mahfud, Yunita Dwi Pristiani, Suratman, "Pendidikan Wawasan Kebangsaan Di Pondok Pesantren Lirboyo dalam Upaya Menangkal Radikalisme," *Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 2022.
- [3] A. M. Mubarak, "PERAN KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DALAM INTERNALISASI WAWASAN KEBANGSAAN BAGI GENERASI MILENIAL UNTUK MENGHADAPI DISINTEGRASI BANGSA DI KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT," 2020.
- [4] Lisnawati Suargana a dan Dinie Anggraeni Dewi, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Wawasan Kebangsaan di Era Global," *Jurnal Penelitian Ilmu Nasional*, 2021.
- [5] Adima M. N. F, Renaldy R., Amalia Y., Rayaswala N. P., "RELEVANSI PANCASILA DI KALANGAN GENERASI Z," *ADVANCES in Social Humanities Research*, pp. 307-314, 2023.
- [6] Wardaya, A., Kurniawan, N. B., "KEBIJAKAN PUBLIK DI BIDANG PENDIDIKAN: PENGARUH MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI SISWA DENGAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI DIGITAL SEBAGAI VARIABEL MEDIASI," *Jurnal Pendidikan Teknologi*, pp. 128-135, 2022.
- [7] ID. Badan Kesbangpol Kota Palembang. (2023). *RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026*. Palembang
- [8] Rusnila, Pendidikan Kewarganegaraan, Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2016.

- [9] Wijiyo, H., Indrawan, I., Cahyono, Y., Santako, R., Generasi Z Dan Revolusi Industri 4.0, Purwokerto: CV. Pena Persada, 2020.
- [10] S. Hermieken, "PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SUNGAI PENUH DALAMPEMBINAAN ORGANISASI SOSIAL POLITIK ORGANISASI KEMASYARAKATAN," *Jurnal Administrasi Negara*, 2022.